
JURNAL PENA INDONESIA

Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya

Volume 7, Nomor 1, April 2021

ISSN: 22477-5150, e-ISSN: 2549-2195

“KADRUN”, KPK, DAN *BUZZER* DI LINGKUNGAN *TEMPO*: ANALISIS WACANA KRITIS RUTH WODAK

Daffa Imam Naufal

Universitas Pendidikan Indonesia
daffaimamnaufal8@upi.edu

Jatmika Nurhadi

Universitas Pendidikan Indonesia
jatmikanurhadi@upi.edu

Dadang Anshori

Universitas Pendidikan Indonesia
dadanganshori@upi.edu

ABSTRAK

Buzzer dan “Kadrun” merupakan dua kelompok yang berseberangan dan tidak jarang memicu konflik di media sosial. *Buzzer* yang identik dengan pendukung pemerintah kerap menyerang “Kadrun” dengan wacana-wacana yang frontal. “Kadrun”, seringkali digambarkan sebagai kelompok yang selalu menentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Konflik antara *buzzer* dan “Kadrun” saat ini mulai merambah ke media massa, salah satunya adalah *Tempo*. Konsistensi *Tempo* terhadap produksi wacana yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang dirasa merugikan pihak-pihak yang berlawanan dengan pemerintah. *Tempo* pun dilabeli sebagai media “Kadrun” oleh *buzzer* karena konsistensinya memproduksi wacana yang tidak sejalan dengan pemerintah. Konsistensi *Tempo* terhadap wacana 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan pun tampak menjadi klimaks dari sikap aktif *Tempo* mengkritik upaya pelemahan KPK ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keberpihakan *Tempo* terhadap wacana 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan dan hubungan *Tempo* dan *buzzer* yang kerap menyerang media yang mengalami beberapa kali pemberedelan ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode historis-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Tempo* mengambil posisi sebagai pihak yang kontra terhadap wacana pemberhentian 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan ini. Penelitian ini diharapkan dapat memicu hadirnya penelitian-penelitian lain yang berupaya mengupas lebih dalam terhadap segregasi politik yang terjadi di Indonesia, antara “Kadrun” dan *buzzer*.

Kata Kunci: *Tempo*, kadrun, *buzzer*, KPK, analisis wacana kritis Wodak.

ABSTRACT

Buzzer and “Kadrun” are two opposing groups and often spark conflicts on social media. Buzzers who are synonymous with government supporters often attack “Kadrun” with frontal discourses. “Kadrun”, is often described as a group that always opposes government policies. The conflict between *buzzer* and “Kadrun” is currently spreading to the mass media, one of which is *Tempo*. *Tempo*'s consistency in the production of discourses related

to government policies that are considered to be detrimental to those who are opposed to the government. The buzzer labeled Tempo as "Kadrun" because of its consistency in producing discourse that was not in line with the government. Tempo's consistency with the discourse of the 75 employees who did not pass the national insight test seemed to be the climax of Tempo's active attitude in criticizing the efforts to weaken the KPK. The purpose of this study was to find out how Tempo sided with the discourse of 75 KPK employees who did not pass the national insight test and Tempo's relationship and the buzzer who often attacked the media that had experienced these bans several times. The research method used is the historical-comparative method. The results showed that Tempo took a position opposing the discourse of dismissing 75 KPK employees who did not pass this national insight test. This research is expected to trigger the presence of other studies that attempt to explore more deeply the political segregation that occurs in Indonesia, between "Kadrun" and buzzer.

Keywords: Tempo, kadrun, buzzer, KPK, Wodak 's critical discourse analysis.

PENDAHULUAN

Di era digital ini, pemerolehan informasi-informasi yang terjadi di belahan dunia akan mudah didapat dengan cara mengaksesnya di dunia maya. Media berlomba-lomba untuk menyajikan berita seaktual mungkin. Media massa konvensional pun sebagian besar mulai memperluas pengaruhnya menjajal dunia daring. Kondisi ini membuat berkembangnya media-media daring yang tidak semata-mata menyajikan berita, namun membawa ideologi yang berbeda. Ideologi tersebut tercermin dalam berita-berita yang diproduksi oleh sebuah media dan membawa ideologi media yang membuatnya.

Hal tersebut sejalan seperti yang diungkapkan Halliday bahwa teks tidak terlepas dari konteks situasi dan konteks budaya yang melingkupinya (Butt et al., 1995). Di dalam memahami sebuah teks di media, pemahaman terhadap isi teks saja tidak cukup. Diperlukan pemahaman terhadap konteks situasi dan budaya yang terjadi untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh (Santoso, 2008). Disadari atau tidak, media yang ada tentu dimiliki oleh seseorang atau kelompok tertentu di dalam suatu negara. Pemilik menginginkan media yang dipimpinnya bergerak sesuai dengan kehendaknya. Everett M. Roger (dalam Eriyanto, 2001) menyebutkan bahwa media bukanlah suatu entitas netral, ia bisa dikuasai oleh kelompok dominan yang mengontrol bahkan memarjinalkan kelompok yang tidak dominan (Eriyanto, 2001).

Teks-teks yang bertebaran di media, baik media konvensional atau daring, merupakan sebuah wacana. Wacana merupakan tindakan dalam bentuk interaksi yang merupakan suatu ekspresi penulis dan bertujuan untuk memengaruhi, membujuk, mempersuasi, dan menyanggah (Fairclough, 1995). Wacana-wacana tersebut hidup melalui respons pembaca terhadap wacana yang disuguhkan. Persetujuan dan penolakan menjadi hal yang lumrah terhadap sebuah wacana.

Beberapa waktu lalu, muncul sebuah wacana yang cukup membuat kegaduhan di jagat maya. Wacana tersebut ialah gagalnya 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Tes Wawasan Kebangsaan dalam rangka pengalihstatusan menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Wacana tersebut menjadi polemik di antara masyarakat Indonesia yang pro dan kontra terhadap revisi Undang-Undang KPK pada 2019 lalu. Masyarakat yang pro terhadap revisi Undang-Undang KPK menganggap pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN sebagai kesatuan dari revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, sedangkan masyarakat yang kontra menganggap pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN akan membuat kinerja KPK melemah karena sudah tidak independen. Wacana terkait gagalnya 75 pegawai KPK dalam Tes Wawasan Kebangsaan menjadi *headline* di beberapa media, termasuk *Tempo*. *Tempo* dikenal sebagai media yang sangat keras dalam melakukan kritik terhadap kebijakan pemerintah yang berpotensi merugikan rakyat. *Tempo* seringkali tidak memihak pada institusi pemerintah yang besar, tetapi berpihak kepada korban (Maghvira, 2017). Keberpihakan *Tempo* pada KPK membuat para pendengung atau “*Buzzer*” menyematkan stigma bahwa *Tempo* merupakan media “Kadrun” (kadal gurun). Penelitian ini berupaya untuk melihat rekam jejak bagaimana konsistensi wacana *Tempo* terhadap KPK yang berakibat pada cap *Tempo* sebagai media “Kadrun” yang disematkan oleh para *buzzer*.

Persoalan mengenai wacana *Tempo* terhadap nasib KPK setelah menghadapi revisi Undang-Undang KPK 2019 layak untuk dibicarakan karena terdapat jejak historis di dalamnya. Jejak historis tersebut dapat menjadi tanda bagaimana keberpihakan *Tempo* dalam pemberitaannya terhadap KPK. Selain itu, jejak historis pemberitaan *Tempo* terhadap isu-isu yang hangat di Indonesia selama beberapa

tahun terakhir dapat menjadi alasan pokok permasalahan *Tempo* dicap sebagai media "Kadrun" oleh para "Buzzer". Penyematan label "Kadrun" ini tidak terlepas dari kontestasi politik pada 2019 lalu. Penyematan label "Kadrun", "Cebong", "Kampret", dan lain-lain nyatanya menimbulkan segregasi dalam masyarakat Indonesia.

Wacana *Tempo* terkait nasib KPK pasca revisi Undang-Undang KPK muncul ketika *Tempo* merilis Majalah *Tempo* edisi 14 September 2019 berjudul "Janji Tinggal Janji". Majalah dengan cover wajah Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo dan siluet tokoh kartun pinokio di belakangnya yang memantik kemarahan relawan Jokowi-Ma'ruf Amin. Majalah tersebut berisi beberapa wacana, di antaranya adalah tanggapan Presiden Joko Widodo terhadap revisi Undang-Undang KPK dan pemilihan calon pimpinan KPK, yang akhirnya dimenangkan oleh Inspektur Jenderal Firli Bahuri, dan wacana berjudul "Hidup-Mati Komisi Antikorupsi". Majalah tersebut tidak luput dari serangan *buzzer* yang menyatakan bahwa *Tempo* hanya media bayaran "Kadrun".

Penelitian terhadap media *Tempo* pernah dilakukan oleh Genta Maghvira pada 2017 dengan judul "Analisis Wacana Kritis pada Pemberitaan *Tempo.co* tentang Kematian Taruna STIP Jakarta yang diterbitkan oleh *Jurnal The Messenger*". Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *Tempo.co* melakukan pemilihan diksi, penggunaan kalimat sebab akibat, dan pemilihan narasumber dalam produksi teks berita (Maghvira, 2017). Selain itu, terdapat penelitian yang berjudul "Analisis Wacana Kritis pada Tajuk (Anti) Korupsi di Surat Kabar Berbahasa Indonesia" yang ditulis oleh Hari Bakti Mardikantoro pada 2014. Penelitian tersebut menunjukkan ketidaksetujuan Koran *Tempo* terhadap berita korupsi (Mardikantoro, 2014).

Penelitian ini menggunakan metode Analisis Wacana Kritis Ruth Wodak (*Discourse-Historical Approaches*). Analisis wacana ini disebut sebagai analisis wacana historis karena menurut Wodak, analisis terhadap wacana perlu menyertakan konteks sejarah yang berakibat pada bagaimana suatu kelompok atau komunitas digambarkan dalam wacana (Fauzan, 2014). Analisis wacana historis meliputi tiga dimensi; (1) penentuan topik yang spesifik; (2) menginvestigasi

strategi-strategi diskursif; (3) menganalisis relasi-relasi makna kebahasaan yang tertulis dan kebahasaan dalam konteks tertentu (Fauzan, 2014). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis-komparatif. Neuman (dalam Karyanta, 2020) menyebutkan bahwa historis komparatif merupakan metode yang menempatkan waktu sejarah dan variasi antar budaya sebagai pusat penelitian, pengumpulan data dan penganalisisan data. Pengetahuan menyeluruh terhadap sejarah dan konteks budaya yang meliputi penelitian akan berpengaruh besar terhadap keberhasilan penggunaan metode ini (Karyanta et al., 2020).

PEMBAHASAN

Analisis wacana kritis di dalam penelitian ini menggunakan analisis wacana kritis Ruth Wodak (*Discourse-Historical Approaches*). Analisis wacana ini menyertakan konteks sejarah bagaimana wacana digambarkan. Analisis wacana kritis model Ruth Wodak ini dilakukan melalui tiga dimensi. Pertama, menentukan topik yang spesifik dari sebuah wacana yang spesifik. Penentuan topik ini penting dilakukan guna mencari rekam jejak sejarah bagaimana topik tersebut sebelumnya diproduksi dalam sebuah media. Kedua, menelaah strategi-strategi diskursif. Ketiga, menganalisis realisasi makna-makna kebahasaan yang spesifik dan makna-makna dalam konteks tertentu (Fauzan, 2014).

Wacana yang akan dibahas di dalam penelitian ini adalah tiga wacana dalam Koran *Tempo* edisi 7 Mei 2021 dengan *headline* “Kedok Kampanye Anti-Taliban”. Wacana-wacana tersebut berjudul “Kedok Kampanye Anti-Taliban”, “Menjegal Pegawai Segudang Prestasi”, dan “Mereka Bukan ‘*Kadrun*’. Berikut akan disajikan wacana-wacana tersebut.

Kedok Kampanye Anti-Taliban

Stigma “Islam radikal” dan “kaum Taliban” bagi sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi diduga merupakan bagian dari kampanye pembusukan lembaga antirasuah itu. Tes wawasan kebangsaan—yang diklaim untuk menangkal radikalisme—terbukti tak hanya menjegal penyidik dan pegawai yang beragama Islam. Sebagian dari mereka punya kesamaan: pernah

membongkar kasus besar, menolak pelemahan dan revisi Undang-Undang KPK, serta kritis terhadap pimpinan KPK saat ini.

Menjegal Pegawai Segudang Prestasi

Alasan berpaham radikalisme terbantahkan karena 75 pegawai KPK yang tak lolos tes kebangsaan berasal dari berbagai agama.

JAKARTA – Sejumlah kalangan menilai hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) penuh dengan kejanggalan. Sebab, 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes itu justru para penyidik, penyelidik, serta pegawai senior dengan rekam jejak mumpuni dalam pemberantasan korupsi. Peneliti dari Indonesia Corruption Watch, Wana Alamsyah, mempersoalkan hasil tes wawasan kebangsaan yang tidak meluluskan para pegawai KPK yang dikenal kritis dan sudah menangani berbagai kasus korupsi besar di Tanah Air. Wana menduga para pegawai itu sengaja disingkirkan justru karena konsistensi mereka dalam memerangi korupsi.

Wana tak percaya 75 pegawai itu tidak lulus karena mereka berpaham radikal dalam beragama, seperti yang kerap didengungkan barisan pendukung pelemahan KPK. Para pendengung, termasuk di media sosial, kerap melabeli sejumlah pegawai KPK dengan sebutan "Taliba". Sebutan ini mengarah pada pegawai KPK yang beragama Islam dengan ketaatan tinggi dalam menjalankan ibadah. "Justru bisa jadi ada sentiment pribadi, bukan dalam konteks professional," kata Wana, kemarin.

Dua hari lalu, KPK mengumumkan bahwa 75 pegawai tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Tes ini merupakan proses alih status 1.351 pegawai KPK menjadi aparat sipil negara.

Alih status pegawai ini merupakan imbas dari revisi Undang-Undang KPK pada 2019. Penyelenggara tes wawasan kebangsaan adalah KPK bekerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara. Tes juga melibatkan Badan Intelijen Negara, Badan Intelijen Strategis, dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.

Wakil Ketua KPK nurul Ghufron mengatakan ada tiga aspek yang diukur dalam tes wawasan kebangsaan, yaitu integritas, netralitas, dan radikalisme. Syarat pegawai KPK menjadi aparat sipil negara adalah setia kepada Pancasila, Undang-Undang

Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Agar bisa menjadi aparatur sipil negara, kata Gufron, pegawai KPK tidak boleh terlibat dalam organisasi yang dilarang pemerintah serta harus memiliki integritas dan moralitas yang baik.

Berdasarkan penelusuran *Tempo*, mereka yang dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan berasal dari beragam latar belakang, baik agama maupun posisinya di KPK.

Sebagian pegawai yang tidak lolos itu non-muslim. Mereka adalah Andre Dhedy Nainggolan (kepala satuan tugas penyidik KPK), Tigor Simanjuntak (pegawai fungsional Biro Hukum), Samuel (pegawai fungsional biro SDM), Benedictus Siumlala (pegawai fungsional peran serta masyarakat dan Wadah Pegawai), Hotman Tambunan (kepala satgas pendidikan dan pelatihan), Herbert Nababan (penyidik dan Rieswin (penyidik).

Adapun pegawai beragama Islam yang dinyatakan tidak lulus antara lain penyidik Novel Baswedan, Ambarita Damanik, dan Marc Falentino. Lalu ada Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi, Sujanarko; serta Direktur Sosialisasi dan Kampanya Antikorupsi, Giri Suprapdiono.

Para penyidik yang dinyatakan tidak lolos tes juga punya rekam jejak yang panjang dalam membongkar kasus korupsi besar. Andre Nainggolan, misalnya, merupakan penyidik kasus korupsi simulator kemudi di Korps Lalu Lintas Polri pada 2012. Perkara ini menyeret Inspektur Jenderal Djoko Susilo sebagai tersangka, yang di pengadilan divonis 18 tahun penjara.

Teranyar, Andre menjadi menyidik kasus korupsi bantuan sosial penanganan Covid-19 di Kementerian Sosial. Tersangka kasus ini adalah Juliari Peter Batubara, mantan Menteri Sosial yang juga Wakil Bendahara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dua politikus PDIP juga disebut-sebut terlibat dalam perkara ini, yaitu Herman Hery dan Ikhsan Yunus.

Falentiono juga menangani berbagai kasus korupsi kakap. Ia bersama Novel Baswedan menjadi penyidik kasus korupsi kartu tanda penduduk berbasis elektronik. Kasus ini menyeret bekas Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Setya Novanto. Masih banyak nama yang disebut-sebut terlibat dalam rasuah ini.

Perkara terbaru yang ditangani Falentino adalah dugaan suap terhadap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah. Mantan Bupati Bantaeng itu maju dalam pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan pada 2018 dengan diusung oleh PDIP, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

Andre belum menjawab permintaan konfirmasi *Tempo* soal namanya yang termasuk dalam 75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan. Adapun Falentino mengetahui bahwa namanya masuk daftar itu dari media massa. "Sampai saat ini belum ada pemberitahuan resmi dari KPK, baik melalui *e-mail* maupun surat," katanya. Rieswin, sementara itu, enggan berkomentar saat dikonfirmasi soal namanya yang tak lolos asesmen wawasan kebangsaan.

Sejauh ini, KPK belum mengumumkan secara resmi 75 nama pegawai yang tak lolos tes wawasan kebangsaan tersebut. Lewat *e-mail* internal, lembaga ini menginformasikan perkembangan hasil tes itu, kemarin.

E-mail yang dikirim Sekretariat Jenderal KPK itu berisi dua poin. Pertama, pemimpin KPK akan menerbitkan surat keputusan hasil tes wawasan kebangsaan. Kedua, Salinan surat keputusan tersebut akan disampaikan kepada setiap pegawai dalam kurun waktu satu pekan.

Berbagai pihak, termasuk pegawai KPK, mempertanyakan standar kelulusan tes wawasan kebangsaan tersebut. sejumlah pegawai KPK yang masuk daftar tak lulus tes itu tidak mengerti mengapa mereka dinyatakan tidak memenuhi syarat. Mereka juga tak habis pikir bila dianggap berpaham radikalisme.

"Di antara 75 orang itu lengkap, ada yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Buddha. Lalu radikalisme macam apa yang membuat kami enggak lolos?" kata seorang pegawai KPK.

Sejumlah pegawai KPK menceritakan pengalaman mereka ketika diwawancarai. Seorang pegawai non-muslim mengaku mendapat pertanyaan yang tidak relevan selama sesi wawancara. Misalnya, ia ditanya soal pendapatnya tentang Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia. Ada pula pertanyaan apakah pelaku Bom Bali, yaitu Amrozi, berjihad ketik melakukan bom bunuh diri. "Aneh juga pertanyaan itu kalau untuk saya karena saya bukan muslim," katanya.

Pegawai lain menceritakan bahwa ia ditanya tentang sikapnya atas penolakan terhadap Firli Bahuri menjadi Ketua KPK pada 2019. Pegawai ini juga ditanya mengenai sikapnya terhadap revisi Undang-Undang KPK serta aksi unjuk rasa yang menolak revisi itu pada September 2019. Pertanyaan lain mengenai sikapnya terhadap pelarangan Partai Komunis dan kemerdekaan Papua.

“Untuk pertanyaan soal Firli, ada yang menjawab ikut menolak karena ada keputusan etik bahwa Firli bertemu dengan TGB (mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat, M. Zainul Madji atau Tuan Guru Bajang),” katanya.

Firli Bahurim, yang dimintai konfirmasi, belum menjawab pertanyaan *Tempo*. Saat konferensi pers di kantor KPK pada Rabu lalu, Firli mengaku tak pernah berniat mendepak orang-orang tertentu dari KPK. “Tidak ada niat KPK untuk mengusir insan KPK. Kita sama-sama berjuang memberantas korupsi,” katanya.

Berbeda dengan klaim Firli, tiga narasumber *Tempo* mengatakan pimpinan KPK sudah memetakan para pegawai sebelum asesmen. Pemetaannya antara lain menggunakan kategori: penyidik dan penyelidik yang menangani kasus korupsi kakap, pengurus Wadah Pegawai KPK, pegawai yang pernah memeriksa kasus dugaan pelanggaran etik Firli Bahuri saat menjabat Deputy Penindakan KPK, serta pegawai yang vokal menolak revisi UU KPK dan menolak Firli sebagai ketua KPK. Dari pemetaan tersebut, muncul sejumlah nama yang bakal tidak diluluskan dalam tes wawasan kebangsaan. “Orang-orang yang terlibat pada masa itu rata-rata masuk daftar,” kata seorang sumber *Tempo*.

Mereka Bukan ‘Kadrun’

Berbagai pihak yang menuding 75 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan berpaham radikalisme dan dianggap “kadrun”. Padahal sebagian dari mereka adalah non-muslim.

BERBAGAI pihak menuding 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak lulus tes wawasan kebangsaan berpaham radikalisme. Bahkan mereka dianggap sebagai kadal gurun alias “kadrun”, yaitu sebutan untuk pegawai KPK beragama Islam dengan ketaatan ibadah yang tinggi. Istilah “kadrun” ini muncul ketika

pemilihan presiden bergulir pada 2019. Berikut ini pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan dan beragama selain Islam.

Andre Nainggolan

Ia menjabat Kepala Satuan Tugas Penyidik KPK. Andre menangani sejumlah kasus besar, di antaranya kasus korupsi bantuan sosial untuk penanganan Covid-19, korupsi simulator kemudi di Korps Lalu Lintas Polri yang menyeret mantan Inspektur Jenderal Djoko Susilo, serta suap terhadap Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan.

Ambarita Damanik

Ia merupakan penyidik senior yang bertugas di KPK sejak 2005. Dia mundur dari Kepolisian RI dan menjadi penyidik independen. Damanik menangani sejumlah kasus korupsi kakap, seperti kasus Bank Century dan kartu tanda penduduk elektronik. Ia juga menangkap mantan ketua DPR, Setya Novanto.

Benydictus Siumlala

Ia merupakan pegawai fungsional di Direktorat Pembinaan dan Peran Serta Masyarakat. Benydictus juga menjadi anggota Wadah Pegawai KPK.

Marc Falentino

Ia menyidik sejumlah kasus korupsi kakap, seperti korupsi KTP elektronik, suap Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, suap Bupati Klaten Sri Hartini, serta kasus suap Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah.

Rasamala Aritonang

Ia menjabat Kepala Bagian Perancangan Produk Hukum, Biro Hukum KPK.

Rieswin

Ia merupakan penyidik yang menangani berbagai perkara kakap di KPK. Rieswin masuk ke KPK lewat program Indonesia Memanggil 12.

1. Spesifikasi Topik

Ketiga wacana di atas memiliki topik yang sama, yakni sorotan terhadap pemecatan 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan yang diadakan. Secara garis besar, dapat terlihat bahwa topik yang dibahas Koran *Tempo* edisi 7 Mei 2021 dengan *headline* "Kedok Kampanye Anti-Taliban" merupakan

pembelaan terhadap 75 pegawai KPK yang dianggap radikal sehingga tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan. Pemilihan topik tersebut disinyalir merupakan pembelaan *Tempo* beberapa pegawai KPK yang mendapat ketidakadilan menurut pandangan beberapa pihak. *Tempo* berupaya membantu menyelamatkan KPK yang independen dengan cara memproduksi wacana-wacana yang berhubungan dengan kegagalan 75 pegawai KPK dalam Tes Wawasan Kebangsaan.

Pemilihan topik yang spesifik dalam penelitian ini bukanlah tanpa alasan. Pemilihan topik terkait pembelaan *Tempo* terhadap beberapa pegawai KPK yang independen dan berusaha disingkirkan oleh pihak lain memiliki hubungan dengan pemberitaan *Tempo* pada 2019 tentang revisi Undang-Undang KPK dan pemilihan pimpinan KPK yang baru. Wacana pembelaan *Tempo* terhadap KPK tersebut terdapat dalam Majalah *Tempo* berjudul “Janji Tinggal Janji” edisi 14 September 2019. Di dalam majalah tersebut, terdapat beberapa wacana yang menyoroti revisi Undang-Undang KPK dan pemilihan pimpinan KPK yang baru yang disinyalir akan melemahkan KPK. Wacana-wacana tersebut berjudul “Saya Ingin KPK Lebih Kuat (Wawancara dengan Presiden Joko Widodo)” dan “Hidup-Mati Komisi Antikorupsi”.

Berdasarkan fakta tersebut, dapat dilihat konsistensi *Tempo* dalam membela KPK yang independen dari pihak-pihak yang berusaha melemahkan KPK. Pembelaan tersebut dilakukan *Tempo* dengan menguak beberapa hal-hal aneh yang terjadi, baik saat pemilihan pimpinan KPK yang baru maupun saat Wawasan Tes Kebangsaan yang digelar sehingga menimbulkan kegaduhan. Melalui pemberitaan tersebut, opini masyarakat digiring untuk memberi citra yang positif terhadap *Tempo* sebagai media yang aktif menyuarakan ketidakadilan yang terjadi di berbagai sistem masyarakat (Maghvira, 2017).

Persamaan yang dapat terlihat dari pembelaan *Tempo* terhadap KPK yang independen sejak 2019 sampai 2021 ini adalah kehadiran *buzzer* yang memprovokasi masyarakat agar berpihak kepada keputusan-keputusan yang dilakukan penguasa terhadap KPK. Dimulai dari provokasi bahwa *Tempo* merupakan media “Kadrun”, sampai cap yang diberikan kepada 75 pegawai KPK yang tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan bahwa mereka berpaham radikal,

Taliban, Kadrun, dan lain-lain. Tidak heran apabila *Tempo* selalu dikaitkan dengan "Kadrun" karena konsistensinya berseberangan dengan kelompok penguasa, khususnya ihwal KPK. Topik seputar pembelaan *Tempo* terhadap KPK yang independen sehingga dituding sebagai "Kadrun" oleh para *buzzer* ini memiliki sejarah tersendiri yang dapat mengungkap dari mana konflik tersebut berasal.

2. Strategi Diskursif

Strategi diskursif merupakan sebuah cara yang digunakan pembicara untuk memaksimalkan pesan yang mereka sampaikan secara efektif. Strategi diskursif terbagi menjadi lima jenis: yaitu strategi rekrutmen, strategi kredibilitas, strategi pendelegasian, strategi dramatisasi, dan strategi kontroversial. Wodak mengajukan beberapa elemen dan strategi diskursif yang harus diperhatikan dalam analisis wacana historis: (1) bagaimana nama orang dan secara linguistik mengacu kepada siapa?; (2) Apa sifat, karakter, kualitas, dan bentuk penggambaran kepada mereka?; (3) Dengan argumentasi seperti apa sekelompok orang digambarkan secara eksklusif dan inklusif; (4) Dari perspektif mana pelabelan, penggambaran, dan argumentasi disampaikan?; (5) Apakah pengungkapan disampaikan secara jelas, apakah diintensifkan, atau dikurangi? (Wodak & Meyer, 2001). Untuk mengungkap elemen dan strategi diskursif tersebut, analisis dilakukan dalam tataran sintaksis guna memperoleh penjelasan terkait posisi fungsi dan peran setiap kata yang disusun.

2.1. Strategi Rekrutmen

Di dalam strategi ini, Wodak dan Meyer (2001) mempertanyakan bagaimana nama seseorang atau kelompok secara linguistik mengacu kepada kelompok lain. Data dan analisis strategi ini sebagai berikut.

"Sejumlah kalangan menilai hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) penuh dengan kejanggalan." (Puspitasari, 2021b).

Nama orang yang disebut dan condong menjadi korban di dalam wacana tersebut adalah pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Pegawai KPK yang tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan tersebut menempati fungsi pelengkap, yang menyatakan 'penderita' dalam tataran sintaksis (Putrayasa, 2014).

Penderita tersebut ialah pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Secara struktur, dapat terlihat bahwa nama orang yang menjadi pokok pembicaraan dalam koran *Tempo* menempati fungsi pelengkap yang menyatakan ‘penderita’. Penempatan nama orang dalam ruang ‘penderita’ membuat pembaca menjadi berpihak kepada wacana yang disuguhkan *Tempo* karena merasa kasihan terhadap para pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan.

2.2. Strategi Kredibilitas

Strategi ini menunjukkan bagaimana seseorang digambarkan sesuai dengan sifat, karakter, dan kualitas (Wodak & Meyer, 2001). Data dan analisis strategi ini sebagai berikut.

“Sebagian dari mereka (75 pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan) punya kesamaan: pernah membongkar kasus besar, menolak pelemahan dan revisi Undan-Undang KPK, serta kritis terhadap pimpinan KPK saat ini.” (Puspitasari, 2021a).

“Sebab, 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus tes itu justru para penyidik, penyelidik, serta pegawai senior dengan rekam jejak mumpuni dalam pemberantasan korupsi.” (Puspitasari, 2021b).

Berdasarkan data tersebut dapat terlihat bagaimana sifat, karakter, kualitas dan bentuk penggambaran terhadap 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Klausula *pegawai senior dengan rekam jejak mumpuni dalam pemberantasan korupsi* menjelaskan bagaimana kualitas dari 75 pegawai KPK tersebut. frasa *rekam jejak mumpuni* yang menduduki fungsi keterangan dalam struktur sintaksis memperjelas kualitas 75 pegawai KPK tersebut. Frasa *kritis terhadap pimpinan KPK saat ini* merupakan salah satu bentuk penggambaran sifat dari pegawai KPK yang tak lolos tes wawasan kebangsaan.

2.3. Strategi Pendelegasian

Strategi pendelegasian adalah strategi yang digunakan untuk melihat bagaimana argumentasi untuk menggambarkan sekelompok orang dilakukan secara inklusi atau eksklusif.

"Sebagian pegawai yang tidak lolos itu non-muslim. Mereka adalah Andre Dhedy Nainggolan (kepala satuan tugas penyidik KPK), Tigor Simanjuntak (pegawai fungsional Biro Hukum), ..." (Puspitasari, 2021b).

"Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengatakan ada tiga aspek yang diukur dalam tes wawasan kebangsaan, yaitu integritas, netralitas, dan radikalisme." (Puspitasari, 2021b).

Penggambaran terhadap orang atau sekelompok orang digambarkan secara inklusi dalam wacana ini. Penggambaran secara inklusi ini menunjukkan bahwa pernyataan-pernyataan yang ditulis dalam wacana *Tempo* tersebut tidak berupaya untuk melindungi pihak manapun melainkan berusaha memberi informasi sejelas mungkin.

2.4. Strategi Dramatisasi

Strategi dramatisasi merupakan strategi yang digunakan untuk melihat perspektif pelabelan, penggambaran, dan argumentasi yang terdapat dalam wacana bersumber dari mana.

"Berbagai pihak yang menuding 75 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan berpaham radikalisme dan dianggap "kadrun". (Puspitasari, 2021c).

"Para pendengung, termasuk di media sosial, kerap melabeli sejumlah pegawai KPK dengan sebutan 'Taliban'" (Puspitasari, 2021b).

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa pelabelan terhadap 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan berasal dari kubu yang berseberangan dengan pihak yang kontra terhadap hasil tes 75 pegawai KPK. Label 'kadrun' yang diterima 75 pegawai KPK disinyalir berasal dari para pendengung atau 'buzzer'. Hal tersebut masuk akal apabila melihat sejarah konflik antara 'buzzer' dan 'kadrun' saat kontestasi politik pada 2019 lalu. Kedua kubu yang berseberangan ini tak ayal memantik segregasi politik antara masyarakat Indonesia. Selain 'kadrun', para 'buzzer' ini juga melabeli 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan sebagai 'Taliban'. Pelabelan 'kadrun' dan 'Taliban' ini dilakukan untuk menggiring opini masyarakat agar setuju terhadap hasil tes 75 pegawai KPK yang tidak lolos dan menganggap keputusan tersebut adalah keputusan yang wajar demi menghindari radikalisme di komisi antirasuah tersebut.

2.5. Strategi Kontroversial

Strategi kontroversial merupakan strategi yang digunakan untuk memengaruhi penerima terhadap pesan yang disampaikan. Pengaruh tersebut dapat dilakukan dengan cara mengungkapkan sesuatu dengan jelas, mengintensifkan pengungkapan, atau justru mengurangi intensitas pengungkapan (Wodak & Meyer, 2001).

“Alasan berpaham radikalisme terbantahkan karena 75 pegawai KPK yang tak lolos tes kebangsaan berasal dari berbagai agama.” (Puspitasari, 2021b).

“Wana tak percaya 75 pegawai itu tidak lulus karena mereka berpaham radikal dalam beragama, seperti yang kerap didengungkan barisan pendukung pelemahan KPK.” (Puspitasari, 2021b).

“BERBAGAI pihak menuding 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tak lulus tes wawasan kebangsaan berpaham radikalisme.” (Puspitasari, 2021c).

Pengungkapan kelompok 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan dilakukan secara intensif dalam wacana ini. Masifnya penyebutan terhadap 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan tersebut merupakan upaya yang dilakukan untuk memengaruhi pembaca agar menaruh perhatian kepada nasib 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

3. Relasi Makna-Makna Kebahasaan

Pengkajian terhadap makna-makna kebahasaan yang berkaitan dengan konteks tertentu sangat penting dilakukan dalam analisis wacana historis ini. Makna-makna kebahasaan yang terdapat dalam wacana-wacana tersebut menunjukkan bagaimana suatu kata memiliki makna kebahasaan yang terikat pada konteks tertentu.

“Berbagai pihak yang menuding 75 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan berpaham radikalisme dan dianggap ‘kadrun’.” (Puspitasari, 2021c)

Kata “kadrun” yang terdapat dalam wacana di atas merupakan sebuah kata yang memiliki makna kebahasaan apabila ditinjau dari segi struktur maupun konteks. “Kadrun” merupakan akronim dari kadal gurun. Istilah “kadrun” merupakan sebuah label yang ditujukan kepada kelompok yang menentang kebijakan Jokowi-Ma’ruf Amin atau pemerintah (Masykuri & Ramadhan, 2021).

Pelabelan diberikan oleh *buzzer* kepada kelompok yang dinilai kearab-raban dan merupakan bagian dari gerakan 212. Pelabelan ini dilakukan semata-mata untuk melegitimasi sebuah kelompok yang bertentangan dengan pemerintah (Masykuri & Ramadhan, 2021). Penyematan istilah "kadrun" ini dilakukan oleh *buzzer-buzzer* yang aktif membela kebijakan-kebijakan pemerintah. *Buzzer* sendiri mulai menjadi sebuah "tren" di media sosial Indonesia pada 2009, ketika Twitter mulai diterima dan digunakan masyarakat Indonesia (Dimedjo, 2019). Istilah *buzzer* menurut *Oxford Dictionaries* merupakan 'An electrical device that makes a buzzing noise and is used for signalling' (Felicia & Loisa, 2019).

Perang wacana antara *buzzer* dan *Tempo* dalam pemberitaan tentang KPK merupakan buntut dari konflik antara *buzzer* dan *Tempo* sejak tahun lalu. Peristiwa itu bermula saat *Tempo* menerbitkan *Majalah Tempo* berjudul "Janji Tinggal Janji" pada 14 September 2019. Majalah tersebut mengandung beberapa opini tentang upaya pelemahan KPK pada saat itu. Wacana-wacana itu berjudul "Saya Ingin KPK Lebih Kuat (Wawancara dengan Presiden Joko Widodo)" dan "Hidup-Mati Komisi Antikorupsi". Konflik itu muncul karena majalah tersebut menampilkan *cover* berupa foto Presiden Joko Widodo disertai bayangan pinokio di belakangnya. Beragam hujatan dari para pendengung terhadap *Tempo* pun bermunculan. Mulai dari wacana bahwa *Tempo* merupakan media "Kadrun" sampai pengaduan kepada dewan pers bahwa *Tempo* dianggap telah melanggar undang-undang karena menghina kepala negara. Redaktur Eksekutif Majalah *Tempo*, Setri Yasra mengatakan bahwa sampul tersebut merupakan metafora atas dinamika yang terjadi, yaitu tudingan pegiat anti korupsi bahwa Presiden Joko Widodo ingkar janji dalam upaya penguatan KPK (Putri, 2019).

Konflik antara "Kadrun" dan *buzzer* akan terus berlangsung walaupun pemilihan umum 2014 dan 2019 sudah terlalui bertahun-tahun. Konsistensi mereka yang dianggap "Kadrun" untuk menentang kebijakan-kebijakan pemerintah akan terus berlanjut. Posisi *Tempo* yang selalu berusaha membela golongan yang mereka anggap perlu diberikan keadilan semakin mendorong *buzzer* untuk terus melakukan pembelaan-pembelaan dengan berbagai upaya, baik upaya yang wajar maupun yang tak wajar. Bagaimanapun, *buzzer* politik di Indonesia telah mencederai proses demokrasi mealui konten-konten yang dapat memecah belah masyarakat (Syahputra, 2017).

SIMPULAN

Wacana *Tempo* yang lebih banyak kontra terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah merupakan konsistensi *Tempo* sejak media tersebut berdiri. Pemberedelan yang terjadi pada masa orde baru tidak membuat *Tempo* berhenti untuk mengambil posisi sebagai media yang aktif menyuarakan hak-hak masyarakat. Pengangkatan isu terkait 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan tampak menjadi klimaks dari wacana-wacana perlawanan *Tempo* terhadap paket pelemahan KPK. Wacana-wacana terkait 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan digambarkan sebagai kelompok yang memiliki karakter dan kualitas mumpuni namun justru dilabeli sebagai kaum “Kadrun” yang radikal. Pelabelan “Kadrun” oleh *buzzer* yang tidak henti memberikan segregasi dalam politik Indonesia semakin memperparah keadaan. *Tempo* hadir melalui wacana-wacana yang mencoba membantah tuduhan *buzzer* tersebut dan menambah sasaran baru bagi *buzzer* untuk memproduksi wacana-wacana melawan “Kadrun” dan *Tempo*.

DAFTAR PUSTAKA

- Butt, D., R, F., S, S., & C, Y. (1995). *Using Functional Grammar: An Explorers Guide*. Macquary University.
- Dimedjo, E. (2019). Sejarah Keberadaan Buzzer Politik di Indonesia. *Tagar.Id*.
<https://www.tagar.id/sejarah-keberadaan-buzzer-politik-di-indonesia>
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana: Pengantar Analisis Teks Media*. LKiS.
- Fairclough, N. (1995). *Critical Discourse Analysis: The Critical Study of Language*. Longman Group Limited.
- Fauzan, U. (2014). ANALISIS WACANA KRITIS DARI MODEL FAIRCLOUGH HINGGA MILLS. *PENDIDIK*, 6(1).
- Felicia, F., & Loisa, R. (2019). Peran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter. *Koneksi*, 2(2), 352.
<https://doi.org/10.24912/kn.v2i2.3906>
- Karyanta, N. A., Suryanto, S., & Hendriani, W. (2020). Menggunakan metode

- historis komparatif dalam penelitian psikologi. *Jurnal Psikologi Sosial*, 18(2), 145–156. <https://doi.org/10.7454/jps.2020.15>
- Maghvira, G. (2017). Analisis Wacana Kritis pada Pemberitaan TEMPO.CO tentang Kematian Taruna STIP JAKARTA. *Jurnal The Messenger*, 9(2), 120. <https://doi.org/10.26623/themessenger.v9i2.463>
- Mardikantoro, H. B. (2014). Koran Tempo ., *Litera*, 13(2), 1--17.
- Masykuri, R., & Ramadhan, M. F. S. (2021). *Analisis Manifestasi Segragasi Politik Pelabelan dan Polarisasi di antara Kelompok Islam Sepanjang 2014-2019*. 12(1), 68–87. <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.68-87>
- Puspitasari, M. A. (2021a, May). Kedok Kampanye Anti-Taliban. *Tempo*.
- Puspitasari, M. A. (2021b, May). Menjegal Pegawai Segudang Prestasi. *Tempo*.
- Puspitasari, M. A. (2021c, May). Mereka Bukan "Kadrun." *Tempo*.
- Putrayasa, I. B. (2014). *Analisis Kalimat: Fungsi, Kategori, dan Peram* (A. Susana (ed.)). PT Refika Aditama.
- Putri, Z. (2019, September). Majalah Tempo Bantah Hina Jokowi Lewat Cover Siluet Pinokio. *Detik.News*. <https://news.detik.com/berita/d-4708350/majalah-tempo-bantah-hina-jokowi-lewat-cover-siluet-pinokio>
- Santoso, A. (2008). Jejak Halliday dalam Linguistik Kritis dan Analisis Wacana Kritis. *Bahasa Dan Seni*, 36(11), 1–14.
- Syahputra, I. (2017). Demokrasi Virtual Dan Perang Siber Di Media Sosial: Perspektif Netizen Indonesia. *Jurnal ASPIKOM*, 3(3), 457. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.141>
- Wodak, R., & Meyer, M. (2001). *Methods of Critical Discourse Analysis*. SAGE Publications Ltd.